



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA KAPENCAR**

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANAN**

(LKPP)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

**KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK
DESA KAPENCAR

Jln. Sindoro - Sumbing, Telp 0853 0286 0238
Kode pos 56371

K e p a d a ,

Yth : Ketua Badan
Permasyarakatan Desa
(BPD) Desa Kapencar

Di

K A P E N C A R

SURAT PENGANTAR LKPP

Nomor : 935 / 78

N OMOR URUT	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAK NYA	KETERANGA N
1	2	3	4
1	Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) tahun 2017	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Kapencar, 27 Januari 2018

Kepala Desa Kapencar

VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Wonosobo;

2. Camat Kertek;

3. P e r t i n g g a l

Diterima

tanggal.....

Yang menerima

.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Kapencar khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Tahun 2017, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan (LKPP) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Kapencar yang maju dan teratur sarana prasarana, aman, sehat cerdas, bermoral dan mapan ekonomi dengan teknologi tepat guna.

Kapencar, 27 Januari 2018

Kepala Desa Kapencar

VIKI ANDRIYAN SUSANTO

DAFTAR ISI

Sampul
Pengantar
Daftar isi

A. PENDAHULUAN

1. Tujuan
2. Visi misi
3. Strategi dan kebijakan
4. Prioritas Desa

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

F. PELAKSANAAN APBDES

1. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2017
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Laporan Realisasi APBDes Semester 2 (*Hasil Mitra Desa*)

G. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DI TEMPUH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

H. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Ucapan Terima Kasih
3. Saran

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA KAPENCAR (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017**

A. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi mewujudkan sebuah pemerintahan yang bekerja atau yang dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan selalu mendasarkan pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, sehingga semua warga masyarakat dapat merasakan atau menikmati adanya peningkatan kesejahteraan. Dengan kata lain, prosesnya dilaksanakan secara bersama-sama dan hasilnya juga dirasakan secara bersama-sama. Untuk itu, dirumuskan visi dan misi sebagai berikut.

a. Visi

“ Madep mantep membangun bersama masyarakat yang lebih maju “

b. Misi

1. Mewujudkan Kapencar Desa yang maju dan teratur sarana prasarana
2. Mewujudkan Kapencar aman, sehat, cerdas, dan bermoral
3. Mewujudkan Masyarakat Kapencar mapan ekonomi dengan teknologi tepat guna
4. Mewujudkan Kapencar dengan rumah sehat dan potensi sebagai desa wisata

3. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

1. Pembangunan disegala bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh, dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.
2. Pembangunan yang diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak dasar warga masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan.

Hak dasar meliputi :

- a. hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (pangan, sandang, papan) yang terjangkau;
- c. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan;
- d. hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan;
- e. hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;

- f. hak untuk memperoleh perlindungan hukum;
- g. hak untuk memperoleh rasa aman;
- h. hak untuk memperoleh keadilan;
- i. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan Kelembagaan Desa dan perubahan; dan
- j. hak untuk berinovasi.

3. Agenda Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menempatkan sesuai dengan tupoksi dan pembinaan terhadap lembaga yang ada.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lebih maju.

4. Prioritas Desa

Prioritas pembangunan desa tahun 2017 dirumuskan berdasarkan arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo untuk tahun 2017 Berdasarkan analisis masalah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka prioritas pembangunan desa Kapencar tahun 2017 diarahkan untuk :

1. Penanganan Kemiskinan

Penanganan kemiskinan di desa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi ; pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan pekerjaan.

a. Pendidikan

Prioritas bidang pendidikan pada tahun 2017 diarahkan untuk mendukung upaya penuntasan wajar dikdas 12 tahun dan penuntasan buta aksara serta peningkatan derajat pendidikan masyarakat, serta meningkatkan animo untuk mendidik anak usia dini lewat PAUD dan Taman Kanak-kanak.

b. Kesehatan

Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membangun kesiapsiagaan masyarakat dibidang kesehatan.

c. Pemenuhan Pekerjaan

Prioritas bidang ini diarahkan untuk mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan dengan meningkatkan kualitas daya saing pencari kerja.

2. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan ekonomi rakyat diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi rakyat yang memberi insentif atau berdampak positif bagi penanggulangan kemiskinan. Pembangunan yang dilaksanakan adalah melalui revitalisasi pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan, koperasi, kerajinan, usaha kecil dan industri rumah tangga.

3. Pembangunan Infrastruktur

Prioritas pembangunan infrastruktur antara lain menyangkut sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman

4. Penyelenggaraan Pemerintahan

Prioritas pembangunan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa Pada Tahun 2017, Pemerintah Desa Menganggarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 190.820.000 dan realisasi anggaran Rp 184.320.000 (96.5 %). *Di karenakan pada waktu pengadaan Kaur Pemerintahan tidak ada yang memenuhi syarat/ nilai, jadi anggaran tersebut menjadi silpa.*

Untuk memperlancar pelayanan administrasi desa menganggarkan Operasional Pemerintahan Desa sebesar Rp 102.394.500 dan realisasi anggaran Rp 102.394.500 (100 %).

Untuk memperlancar kegiatan BPD Pemerintah Desa Menganggarkan Tunjangan dan Operasional BPD Rp 32.630.000 dan realisasi anggaran Rp 32.630.000 (100 %).

Untuk memperlancar kegiatan RT / RW Pemerintah Desa Menganggarkan Insentif RT/RW Rp 56.700.000 dan realisasi anggaran Rp 56.700.000 (100 %). Untuk memperlancar pelayanan administrasi Pemerintah Desa Menganggarkan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 82.570.000 dan realisasi anggaran Rp 82.570.000 (100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan SDM Perangkat Desa, Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa melalui Promosi Dan Ujian sebesar Rp 16.654.000 dan realisasi anggaran Rp 16.654.000 (100 %) di karenakan saat ujian perangkat desa tidak ada yang memenuhi syarat/ nilai dan tidak ada yang jadi sehingga dana tersebut menjadi silpa.

C. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Pembangunan dan/atau perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 25.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000 (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan Rabat Beton dan Rolak Jalan Protokol Dusun Sontonayan sebesar Rp 107.220.000 dan realisasi anggaran Rp 107.220.000 (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan Rabat beton dan rolak Jalan Dusun Kapencar Rp. 45.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 45.000.000 (100 %).

Untuk memperlancar air hujan dan saluran dari rumah tangga Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan drainase empat unit di RT 01 RW.02, RT.06 RW 05, dan Jalan Protokol Dsn Sontonayan sebesar Rp. 20.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000 (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.02 RW.04 Dusun Sontonayan sebesar Rp. 23.690.000 dan realisasi anggaran Rp. 23.690.000 (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.06 RW.03 Dsn Sontonayan Rp. 15.915.000 dan realisasi anggaran Rp. 15.915.000 (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan pavingisasi jln ling RT.01 RW 07 Dsn Kapencar Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln lingk RT.03,04,05,06 RW.06 dan RT.01,03,05 RW 07 Dusun Kapencar Rp. 32.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 32.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.03 RW.08 Dsn Kapencar Rp. 12.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.01, 02 RW.09 Dsn Kpc Rp. 27.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 27.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan rabat beton dan rolak jln RT.07, 10 RW.09 Dsn Kpc Rp. 19.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 19.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar Saluran air dan transportasi masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan SPAL, rabat beton dan rolak jln link RT 12 RW 09 Dusun Kapencar Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Menganggarkan Pembangunan SPAL RT.02 RW.06 Dusun Kapencar Rp. 10.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 10.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL RT.01 RW.03 Dusun Sontonayan Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar Saluran air penduduk Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan SPAL RT.04 RW.01 Dsn Sontonayan Rp.13.175.000,- dan realisasi anggaran Rp. 13.175.000,- (100 %).

Untuk memperlancar kebutuhan sarana prasaran olah raga masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Kapencar Rp. 200.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 200.000.000,- (100 %).

Untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan jamban sehat kepada rumah tangga kurang mampu Rp. 25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 25.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar keamanan dan akses ekonomi masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembangunan pemeliharaan Pos Kamling, Sender dan Jalan Desa Rp. 11.450.500,- dan realisasi anggaran Rp. 11.450.500,- (100 %).

D. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana Linmas Pemerintah Desa Mengganggarkan Pembinaan keamanan dan fasilitasi perlengkapan Linmas Rp. 26.920.000,- dan realisasi anggaran Rp. 26.920.000,- (100 %).

Untuk menyambut HUT RI dan hari jadi Wonosobo Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo Rp. 3.375.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.375.000,- (100 %).

E. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Rp. 84.515.152,- dan realisasi anggaran Rp. 84.515.152,- (100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional lembaga pendidikan Paud Rp. 10.890.000,- dan realisasi anggaran Rp. 10.890.000,- (100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional lembaga pendidikan TK Rp. 11.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 11.200.000,- (100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan TPQ AL-HUDA Rp. 12.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 12.200.000,- (100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan TPQ HIDAYATUSSALAM Rp. 6.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,-(100 %).

Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Bantuan operasional keuangan pendidikan sekolah minggu Gereja ST Philipus Rp. 1.800.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.800.000,- (100 %).

Untuk memacu prestasi pendidikan masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberian uang kepada anak sekolah yang berprestasi Rp. 3.150.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.150.000,- (100 %).

Untuk mengembangkan bakat seni dan budaya masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Pemberian uang kepada Group Rebana Fatayat Ranting Kapencar Rp. 3.950.000,- dan realisasi anggaran Rp. 3.950.000,- (100 %).

Untuk mengembangkan bakat seni dan budaya masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Stimulan Pemberian alat rebana untuk lembaga Pendidikan TPQ Al-muhtadin Dusun sontonayan Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.000.000,- (100 %).

Untuk mengantisipasi dan pengurangan resiko bencana masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Kegiatan Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana serta kejadian luar biasa lainnya Rp. 5.700.000,- dan realisasi anggaran Rp. 5.700.000,- (100 %).

Untuk memperlancar update penduduk masyarakat Pemerintah Desa Mengganggarkan Update Profil Desa Rp. 1.800.000,- dan realisasi anggaran Rp. 1.800.000,- (100 %).

Untuk memperlancar operasional LPMD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional LPMD Rp. 5.640.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.640.000,-(100 %).

Untuk memperlancar operasional PPKBD Pemerintah Desa Mengganggarkan Bantuan Operasional PPKBD Rp. 5.245.500,- dan realisasi anggaran Rp. 5.245.500,- (100 %).

Untuk menguatkan kapasitas tentang pangan Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang ketahanan pangan Rp. 23.941.000,- dan realisasi anggaran Rp. 23.941.000,- (100 %).

Untuk menguatkan kapasitas tentang Rumah sehat Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang Rumah sehat Rp. 4.200.000,- dan realisasi anggaran Rp. 4.200.000,- (100 %).

Untuk menguatkan perekonomian Keluarga PKK Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Pemberian modal usaha kepada kelompok UP2K – PKK Rp. 30.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 30.000.000,- (100 %).

Untuk memperlancar operasional KPMD Pemerintah Desa Menganggarkan Bantuan Operasional KPMD Rp. 5.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100 %).

Untuk menguatkan perekonomian dan permodalan masyarakat Pemerintah Desa Menganggarkan Kegiatan Penyertaan modal kepada BUMDes Rp. 20.000.000,- dan realisasi anggaran Rp. 20.000.000,- (100 %).

Keterangan Silpa: Rp: 6.500.000,- (Siltap dan Tunjangan selama 5 bulan untuk Kaur Pemerintahan), Rp 4.439.102,- (Bunga bank tahun 2017), Rp 1.346.000,- (SHU dari BUMDes Tahun 2017). Jadi Jumlah Silpa Tahun 2017 Rp 12.285.102,-.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2017. Bahwa APBDesa Tahun Anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan Desa	Rp .	1.413.745.652,-
2. Belanja Desa, meliputi :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	481.768.500,-
b. Bidang pembangunan	Rp.	661.450.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	30.295.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	220.231.652,-
e. Bidang Tak terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp. <u>1.393.745.652,-</u>
	Surplus / Defisit	Rp. 20.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 20.000.000,-

2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Kapencar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2017. Bahwa Ralisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp .	1.419.530.754,-
2. Belanja Desa, meliputi :		
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	475.268.652,-
g. Bidang pembangunan	Rp.	661.450.500,-
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	30.295.000,-
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	220.231.652,-
j. Bidang Tak terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja	Rp. <u>1.387.245.652,-</u>
	Surplus / Defisit	Rp. 32.285.102,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 20.000.000,-

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2.

Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2017 Semester 2 sebagaimana terlampir.

G. KEBERHASILAN YANG DI CAPAI, PERMASLAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DI TEMPUH

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- a. Pemerintah Desa Kapencar dapat membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi 1 (satu) orang Kepala Desa dan 8 (delapan) orang Perangkat Desa.
- b. Pemerintah Desa Kapencar dapat membayar untuk Operasional Pemerintahan Desa.
- c. Pemerintah Desa Kapencar dapat membayar Tunjangan dan Operasional BPD 11 (sebelas) orang.
- d. Pemerintah Desa Kapencar dapat membayar Insentif RT 63 (enam puluh tiga) orang dan 9 (sembilan) orang.
- e. Pemerintah Desa Kapencar dapat membayar Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa .
- f. Pemerintah Desa Kapencar dapat membiayai Pengisian Perangkat Desa melalui Promosi Dan Ujian namun untuk yang ujian perangkat desa tidak ada yang memenuhi syarat / nilai.

2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

- a. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun / perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 5 (lima) unit / RTS .
- b. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun Rabat Beton dan Rolak Jalan Protokol Dusun Sontonayan dengan volume 38.52 M3.
- c. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun Rabat beton dan rolak Jalan Dusun Kapencar dengan volume 20.70 M3.
- d. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun drainase empat unit di RT 01 RW.02,RT.06 RW 05, dan Jalan Protokol Dusun Sontonayan dengan volume 22.50 M.
- e. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jln RT.02 RW.04 Dusun dengan volume 12.18 M3.
- f. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jln RT.06 RW.03 Dsn Sontonayan dengan volume 10.04 M3.
- g. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun pavingisasi jalan lingkungan RT.01 RW 07 Dusun Kapencar dengan volume 115.72 M2.
- h. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jalan lingkungan RT.03,04,05,06 RW.06 dan RT.01,03,05 RW 07 Dusun Kapencar dengan volume 15.68 M3.
- i. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jln RT.03 RW.08 Dsn Kapencar dengan volume 6.16 M3.
- j. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jln RT.01, 02 RW.09 Dsn Kpc dengan volume 14.32 M3.
- k. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun rabat beton dan rolak jln RT.07, 10 RW.09 Dsn Kpc dengan volume 8.79 M3.
- l. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun SPAL, rabat beton dan rolak jalan lingkungan RT 12 RW 09 Dusun Kapencar dengan volume 2.94 M3.
- m. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun SPAL RT.02 RW.06 Dusun dengan volume 10.05 M3.
- n. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun SPAL RT.01 RW.03 Dusun Sontonayan dengan volume 32.86 M3.
- o. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun SPAL RT.04 RW.01 Dsn Sontonayan dengan volume 12.18 M3.
- p. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun Gedung Serba Guna Desa Kapencar dengan volume 4 x 10 M2.
- q. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun jamban sehat kepada rumah tangga kurang mampu dengan volume 40 (Empat puluh) KK.
- r. Pemerintah Desa Kapencar dapat membangun pemeliharaan Pos Kamling 1 unit, Sender 1 paket dan Jalan Desa 1 paket.

3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi dan melaksanakan Pembinaan keamanan dan fasilitasi perlengkapan Linmas dengan volume 32 (tiga puluh dua) Personil.
- b. Pemerintah Desa Kapencar dapat melaksanakan dan menganggarkan Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Wonosobo 1 paket x 1 tahun.

4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

- a. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan Pelayanan kesehatan Masyarakat dengan volume 5 (lima) unit Posyandu Balita.
- b. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan operasional lembaga pendidikan Paud dengan volume 1 orang x 12 bulan.
- c. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan operasional lembaga pendidikan dengan volume 3 orang x 12 bulan.
- d. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan operasional keuangan pendidikan TPQ AL-HUDA dengan volume 10 orang x 12 bulan.
- e. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan operasional keuangan pendidikan TPQ HIDAYATUSSALAM Rp. dengan volume 10 orang x 12 bulan.
- f. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi kebutuhan operasional keuangan pendidikan sekolah minggu Gereja ST Philipus dengan volume 3 orang x 12 bulan.
- g. Pemerintah Desa Kapencar dapat memenuhi Pemberian uang kepada anak sekolah yang berprestasi dengan volume 39 anak x 1 Tahun.
- h. Pemerintah Desa Kapencar dapat memberikan bantuan barang / alat kepada Group Rebana Fatayat Ranting Kapencar dengan volume : 1 Paket x 1 Tahun.
- i. Pemerintah Desa Kapencar dapat memberikan bantuan barang / alat kepada lembaga Pendidikan TPQ Al-muhtadin Dusun sontonayan volume 1 paket x 1 Tahun.
- j. Pemerintah Desa Kapencar dapat memberikan bantuan Penguatan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana serta kejadian luar biasa lainnya volume 1 paket x 1 Tahun.
- k. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Update Profil Desa dengan volume 1 orang x 12 bulan.
- l. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Bantuan Operasional LPMD dengan volume 8 orang x 12 bulan.
- m. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Bantuan Operasional PPKBD dengan volume 3 orang x 1 tahun.
- n. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang ketahanan pangan dengan volume 1 600 orang x 1 paket.
- o. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang Rumah sehat dengan volume 210 orang x 1 paket.
- p. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Kegiatan Pemberian modal usaha kepada kelompok UP2K – PKK dengan volume 25 orang x 1 paket.
- q. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Bantuan Operasional KPMD dengan volume 5 orang x 1 tahun.
- r. Pemerintah Desa Kapencar dapat Mengganggu Kegiatan Penyertaan modal kepada BUMDes dengan volume 1 paket x 1 tahun.

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kapencar, selain kami rinci di atas juga dapat diurai secara ringkas dalam tabel dibawah ini

N O	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana prasaran jalan masuk desa dan lingkungan bagi masyarakat	1. Terkendala pada musim tembakau	1. Mengatur kegiatan supaya tidak berbenturan dengan musim tembakau
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Penataan Pos keamanan 2. Pelatihan Kelompok dan Ormas utk masalah keamanan	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya perhatian dari masyarakat dan lembaga	1. Penertiban pemanfaatan Pos keamanan 2. Bekerja sama dengan Polmas dan Babinsa untuk mengadakan pelatihan
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Menggerakkan semua elemen masyarakat peduli tentang kesehatan dan Pendidikan 2. Penyertaan Modal untuk Bumdes 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Perlunya pembinaan kebersihan dan pendidikan untuk masyarakat 2. Masih adanya peminjam yg tidak tepat waktu dalam pengembalian 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Sosialisasi dan koordinasi dan mengadakan program Jum'at bersih, mengadakan Posyandu, Menyediakan sarpras untuk TPQ, Memberikan bantuan siswa berprestasi 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes dan memberi surat penagihan, RAT 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

H. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Kapencar
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Kapencar tahun anggaran 2017 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Kapencar.

2. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kapencar Akhir Tahun Anggaran 2017. Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Perangkat Desa Kapencar dan semua unsur yang terlibat.

3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk seperlunya.

Kapencar, 27 Januari 2018
KEPALA DESA KAPENCAR

VIKI ANDRIYAN SUSANTO